

3369-8965-1-SM

by jiko unkhair

Submission date: 01-Aug-2021 07:24AM (UTC+0200)

Submission ID: 1626370799

File name: 3369-8965-1-SM.docx (49.38K)

Word count: 3164

Character count: 21531

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI MASA COVID-19

Ilham Mariyanto¹, Supriansyah²

¹Universitas HAMKA

²Universitas HAMKA

Email: ¹mariyantoilham23@gmail.com, ²supriansyah@uhamka.ac.id

19

(Naskah masuk: dd mmm yyyy, diterima untuk diterbitkan: dd mmm yyyy)

Abstrak

SIMPEG didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi yang mencakup data pegawai, pengelolaan data, perjalanan, manusia dan teknologi serta, dengan dukungan departemen sumber daya manusia, menyediakan layanan yang cepat, lengkap, dan tepat. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan rekomendasi terkait digitalisasi pada data pegawai pemerintah daerah selama masa Covid19. Hasilnya akan ditulis dalam risalah ini. 1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang memungkinkan dan membatasi penerapan digitalisasi data pribadi (SIMPEG) di masyarakat setempat selama masa Covid19. 2) Mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan selama Covid 19 untuk menggalakkan digitalisasi data SDM di masyarakat setempat. Peneliti menganalisis berbagai sumber dari sebelumnya dan melakukan studi bibliografi untuk mengembangkan aplikasi digitalisasi data karyawan, seperti pengembangan aplikasi. Menggunakan metode kualitatif dalam periode masa pandemic Covid-19. Hasil penelitian dan pembahasan dengan SIMPEG ini, kinerja akan lebih efisien dan efektif, Pengembangan menu SIMPEG diperlukan berdasarkan penggajian otoritas lokal dan analisis layanan yang sangat baik, memberikan pelatihan terkait penggunaan SIMPEG secara *offline* maupun *online* yang dianggarkan oleh Pemerintah daerah, Upaya peningkatan digitalisasi data kepegawaian di lingkungan instansi kepegawaian pemerintah.

Kata kunci: Implementasi SIMPEG, Pemerintah Daerah, Covid-19.

IMPLEMENTATION SYSTEM INFORMATION MANAGEMENT EMPLOYEE ON LOCAL GOVERNMENT ON TIME COVID-19

Abstract

SIMPEG is define as an integrated system that includes employee data, data management, travel, people and technology and, with the support of the human resources department, provides fast, complete and right on target services. This research intends to explain recommendations regarding by system for digitizing local government employee data during the Covid19 period. The results will be written in this tract. 1) Describe the factors that allow and limit the application of personal data digitization (SIMPEG) in the local community during the Covid19 period. 2) Describe the efforts made during Covid 19 to promote the digitization of HR data in the local community. Researchers analyzed various sources from before and conducted bibliographic studies to develop applications for digitizing employee data, such as application development. Using qualitative methods in the 19 approach. The results of this research and discussion with SIMPEG, performance will be more efficient and effective, SIMPEG menu development is needed based on local authority payroll and excellent service analysis, providing training related to the use of SIMPEG offline and online budgeted by local governments, Efforts to increase the digitization of personnel data within the government staffing agency.

Keywords: SIMPEG Implementation, Local Government, Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam segala kegiatan administrasi bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Rancangan *good governance* membutuhkan suatu sistem yang dapat memenuhi tuntutan servis agar efektif serta efisien. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas dan fungsi departemen untuk menciptakan departemen yang unggul, termasuk otomatisasi manajemen sistem kepegawaian (SIMPEG).

Implementasi kebijakan e-government menjadikan bagian dari upaya dalam pengembangan e-government. Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah menciptakan revolusi dalam penggunaan internet yang semakin meluas sebagai akses ke dunia maya. Selain transmisi dan penikmatan hiburan, perubahan penggunaan teknologi informasi juga merupakan bagian dari proses regulasi pemerintah.

Implementasi kebijakan e-government dilakukan dengan pengoptimalan dalam penggunaan kemajuan pada TI dan meminimalisir hambatan baik organisasi maupun birokrasi.

Prosedur dalam mengimplementasikan e-government mesti didukung oleh prasarana kelembagaan yang mampu dikenali dan dibangun oleh lembaga, sebagaimana mestinya, untuk mencapai tujuan mereka. Infrastruktur kelembagaan meliputi koordinasi antar lembaga, peningkatan kerjasama, dan komunikasi yang baik antar lembaga terkait [1].

Dengan dibentuknya SIMPEG di tahun 2006, masyarakat setempat sebagai instansi pemerintah yang tugas utamanya mengembangkan dan melaksanakan kebijakan SDM daerah tetap mengacu pada undang-undang nomor 1 dan ayat 2 yang menguraikan pentingnya untuk mengatur dan memelihara informasi karyawan.

SIMPEG juga dinilai sangat penting untuk melayani semua staf yang ada. Karyawan atau pegawai merupakan unsur sumber daya terpenting dalam operasional sebuah organisasi yang harusnya dikelola dengan baik.

Manajemen karyawan yang akurat pada rentang yang sempit dalam meningkatkan performa karyawan dan, pada rentang yang semakin luas, mengarah pada peningkatan keseluruhan dalam kinerja bisnis / pemerintah.

Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai, maka penyusunan SIMPEG sendiri bertujuan untuk memajukan kualitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan prioritas dalam tahap pengembangan.

Tahap pengembangan e-Government ini sangat cocok untuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) khususnya pada masa pandemic Covid19 untuk memahami faktor dan upaya digitalisasi pegawai pemerintahan daerah.

Dapat diketahui bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah sistem dengan kemampuan untuk terlibat dalam bidang sumber daya manusia, menambah, mempertahankan dan memperkaya pengetahuan dan memberikan pengetahuan personel kepada reka yang membutuhkannya. Sebagai penentu keputusan yang akurat pada waktu yang tepat.

Sistem informasi manajemen kepegawaian dikerahkan dengan cepat, dan akurat sebagai pendukung kebijakan pengelolaan pegawai negeri sipil khususnya kebijakan pelatihan pegawai negeri sipil. Sini kondisi SIMPEG umumnya belum *update* secara otomatis, sehingga cepat dan mudah untuk memperoleh data tentang karyawan yang dibutuhkan di setiap titik dalam proses pelatihan. Upaya peningkatan kualitas pekerja, selain lambat, tidak dapat ditutupi secara seragam.

SIMPEG sebagai alat yang terdiri dari perangkat pengolah data, pengumpul data, prosedur, tenaga pengolah data, dan perangkat lunak. Perangkat penyimpanan yang berisi pusat data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, implikasi dan saling menentukan sebagai hal dalam mengupayakan bagi penyedia informasi di bidang kepegawaian. Database yang berisi sekumpulan data seluruh pegawai dan bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara di Departemen dalam negeri dan Pemerintah Daerah.[2]

SIMPEG, adalah aplikasi yang menyediakan informasi kepegawaian, mendukung pengelolaan data kepegawaian dengan berbagai keunggulan. Artinya pengolahan data di komputer dapat melakukan pengolahan data informasi SDM dengan cepat, informasi yang diolah dengan berbagai validasi dan pengecekan menjadi akurat dan jauh lebih tepat. Itu disimpan pada media penyimpanan yang dapat Anda akses kapan saja sehingga Anda dapat mencari dengan mudah dan cepat. Otentikasi pengguna dan otentikasi tingkat pengguna membuat informasi Anda lebih aman dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Mengelola informasi pribadi relatif mudah, hal ini dapat digunakan untuk mengukur produktivitas karyawan selama pemrosesan dan pelaksanaan prosedur perekrutan.

2.2. Digitalisasi Kepegawaian

Dokumen cetak dapat dikonversi ke format digital menggunakan program pemindaian dokumen

semacam Adobe Acrobat atau Omnipage. Dokumen audio dapat dikonversi kedalam format digital menggunakan program pemrosesan audio semacam CoolEdit dan JetAudio. Dokumen video bisa diubah menjadi format digital dengan menggunakan program pengolah video. Proses digitalisasi membutuhkan peralatan seperti pemindai, komputer eksploitasi media sumber, dan pendukung perangkat lunak.

Perangkat lunak dan perangkat keras milik SIMPEG diperoleh dari mitra ber¹⁶ anggaran yang dirumuskan. Platformnya adalah Windows dengan Intel Exon E5. SIMPEG pada BKD Liga Sidoarjo sendiri mengaplikasikan sistem sendiri, bukan BKN Pusat, karena tidak terdapat instruksi langsung dari BKN[3].

Ibrahim mengutarakan bahwa ali¹² media digital adalah sebuah aktivitas pelestarian khasanah budaya bangsa dengan mengalih bentuk *hard file* ke bentuk *soft file*, peralihan media adalah bag¹² proses digitalisasi yaitu proses dari media cetak ke dalam bentuk digital yang dapat disimpan dan direkam, serta dapat diakses melalui media digital[4].

Digitalisasi bertujuan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai cara, termasuk tepatguna dan meningkatnya ruang penyimpanan dan keamar¹ terhadap berbagai jenis ancaman, untuk membuat resolusi, gambar dan suara lebih stabil. SIM terkomputerisasi adalah SIM yang meletakkan alat pengolah data komputer pada posisi kunci.

Saat ini, berbagai bidang kehidupan beralih ke digital untuk efisiensi dan pengoptimalan. Ini termasuk digitalisasi sektor telekomunikasi, penyiaran dan data pemerintah.

2.3. Pemerintah Daerah (PEMDA)

PEMDA dan DPRD meng³⁵ penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pemerintahan bersama, dan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem tersebut[5].

Tujuan keberadaan lembaga atau perangkat negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan sebenarnya menjalankan fungsi pemerintahan. Organisasi-organisasi tersebut harus mampu membentuk proses integrasi yang saling berhubungan secara fungsional[6]. Sistem pemerintahan daerah memiliki beberapa aturan dasar pembagian kekuasaan, seperti aturan pembagian kekuasaan horizontal dan aturan pembagian kekuasaan vertikal. Tafsir UU no. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA[7].

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Pemerintah Daerah dapat menyusun sendiri dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan² sesuai dengan kewajiban pembantu. Bagian dari Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota, dan pejabat publik setempat sebagai pimpinan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagai acuan menentukan wewenang, hak, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan, usahanya, serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang[5]²

Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan dekonsentrasi. Dalam konstelasi ini, tidak mengherankan jika keberadaan dekonsentrasi dipahami oleh pemerintah daerah sebagai kewajiban dan b²³n hak. Asas pemerintahan daerah memiliki tujuan dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur t³¹ang otonomi daerah dan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis studi yang dipakai adalah studi sastra. Menurut Zed, 2008:3 metode pencarian literature adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara data perpustakaan dikumpulkan, dibaca, dicatat, dan dikelola. Dengan mempelajari literatur dengan cara ini, peneliti dapat secara efektif membangun landasan teori, struktur pertimbangan dan hipotesis dari berbagai sumber (sebaiknya direvisi) tanpa mengurangi aspek akademik[8].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perin⁵h KEMENDAGRI No. 17/2000 tentang SIMPEG, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menetapkan SIMPEG SIMPEG sebagai alat yang terdiri dari perangkat pengolah data, pengumpul data, prosedur, tenaga pengolah data, dan perangkat lunak. Perangkat penyimpanan yang berisi pusat data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, bergantung, dan dapat diidentifikasi dalam konteks penyampaian informasi di bidang SDM[9].

Sistem informasi sumber¹¹nya manusia dirasa sangat penting dalam melayani seluruh pegawai yang ada, karena pegawai merupakan faktor terpenting dalam operasional instansi pemerintah. Manajemen yang baik dari sejumlah kecil karyawan berarti lebih banyak staf, yang akan meningkatkan kinerja seluruh pemerintah.³³

Pasal 1 (a) Dengan mengacu pada pokok-pokok kepegawaian UU No. 8 Tahun 1974, pejabat p³⁶ik diangkat oleh pejabat publik dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pejabat publik, jabatan atau ditentukan berdasarkan p³⁴uran lain mempunyai kewajiban negara dan dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[10].¹

Pokok-pokok pekerjaan, khususnya Pasal 43A 1 dan ayat 2, menekankan diperlukannya pengatur dan pemelihara informasi staf. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMPEG) dinilai penting untuk melayani seluruh staf yang ada. Karyawan merupakan aset organisasi yang penting yang harus

dijalankan dengan teratur. Manajemen karyawan yang baik di area mini meningkatkan kinerja karyawan dan sebagian besar meningkatkan kinerja bisnis/pemerintah secara menyeluruh. Mengingat urgensi pengelolaan data pegawai, maka peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia dengan menyiapkan SIMPEG sebagai pengelolaan SDM menjadi salah satu prioritas dalam tahap pengembangan kebijakan.

Dalam jurnal Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo oleh Jurachman Arif (2018) menyatakan bahwa Performa akan lebih efisien dengan SIMPEG ini. Pengembangan menu SIMPEG dipertimbangkan serta analisis keadaan staf dan pelayanan prima BKD Kabupaten Sidoarjo. Penyerasian data PNS antara BKD Kabupaten Sidoarjo dan BKN hanya dapat melalui SAP KBKN menggunakan Excel Data Ekspor dan Impor. Parameter kesuksesan SIMPEG BKD Kabupaten Sidoarjo dapat dibuktikan dengan akurat dan validitas data dilapangan menggunakan database SIMPEG[3].

Digitalisasi adalah proses mengubah media cetak, audio dan video ke format digital. Digitalisasi diselenggarakan untuk mengarsipkan dokumen dalam format digital dan memiliki fungsi menyalin dan membuat koleksi perpustakaan digital. Proses digitalisasi membutuhkan peralatan seperti komputer, pemindai, operator media sumber, dan perangkat lunak pendukung. Dokumen tercetak dapat dikonversi ke format digital menggunakan program pemindaian dokumen contohnya seperti Adobe Acrobat atau Omnipage. Pemrograman program pemrosesan audio seperti CoolEdit atau JetAudio untuk mengonversi dokumen audio Anda ke format digital. Dokumen video dapat dikonversi ke format digital menggunakan program pemrosesan video.

Pada dasarnya, SIMPEG membantu menyediakan data dan informasi karyawan yang akurat. Data seluruh PNS terupdate dan menjadi database. Kegunaan database ini adalah untuk mengelola kebutuhan karyawan akan mobilitas, promosi, cuti, gaji dan tunjangan lainnya.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan yang ada dituliskan jurnal ditulis oleh Maria Djawa dan Durinta Puspasari "Aplikasi SIMPEG yang didukung pemerintah di Badan Sumber Daya Manusia Daerah (BKD) di Asia Timur, Jawa". (2018) didukung oleh Simpeg). Membantu memberikan informasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sebagai pengelolaan manajemen kepegawaian.[11]

Dari interpretasi referensi review di atas, peneliti dapat menelaah bahwa terdapat beberapa aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Kota (SIMPEG) selama Covid-19, terutama penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras SIMPEG. Hal ini dicapai oleh mitra dalam anggaran yang diusulkan, berbasis Windows dengan Intel Exon E5.

SIMPEG tingkat pemerintah daerah selalu menggunakan sistem sendiri daripada sistem pemerintah pusat, karena tidak ada instruksi secara langsung dari pemerintah pusat.

Digitalisasi bertujuan tidak lebih dari mencapai efisien dan optimal dalam banyak hal, termasuk efisien dan optimal ruang penyimpanan, keamanan terhadap beragam jenis ancaman, resolusi tinggi, gambar, dan suara yang lebih stabil. SIM terkomputerisasi adalah SIM yang menempatkan peralatan komputer untuk pemrosesan data di lokasi-lokasi kritis.[11]

Transisi ke digital saat ini sedang berlangsung di berbagai bidang kehidupan dengan tujuan efektif, efisien dan optimal. Hal ini termasuk digitalisasi sektor penyiaran, telekomunikasi dan data pemerintah. Berlandaskan definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan maka digitalisasi merupakan cara penyediaan atau penggunaan sistem secara digital.

SIMPEG Kota dengan sistem server lokal atau sistem offline. Memang, kerusakan apa pun mudah diperbaiki, sementara kerusakan publik dapat diakses melalui sistem online. Hanya ada satu server di ruang khusus, dari mana jaringan lokal (localhost) terhubung ke setiap sekolah BKD Kabupaten Sidoarjo. Dengan 55 klien atau pengguna, akses disesuaikan dengan tugas masing-masing.

Dengan SIMPEG ini, pelayanan akan lebih efisien dan efektif. Pengembangan menu SIMPEG ini diperlukan sejalan dengan analisis status kepegawaian yang prima dan pelayanan pemerintah daerah selama masa Covid19. Sinkronisasi data pegawai antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanya melalui ekspor dan impor data SAPk pemerintah pusat dan Excel. Indikator keberhasilan SIMPEG pemerintah daerah dapat dilihat dari keakuratan dan validitas data lapangan menggunakan database SIMPEG.

Selama tahap pengembangan SIMPEG kota, memiliki unsur yang saling berkorelasi dan digunakan dalam memproses informasi sesuai dengan kepentingan institusi. Faktor-faktor ini secara signifikan berpengaruh pada fungsi sistem informasi dalam pelaksanaan input, proses, output, pengarsipan dan pemantauan untuk mengalihkan sumber daya data menjadi produk informasi komponen tersebut adalah:

- a. Hardware
- b. Perangkat lunak
- c. Basis Data
- d. Jaringan (perangkat lunak jaringan)
- e. Selama implementasi dan pengembangan sumber daya manusia (Software Otak)

Unsur dari SIMPEG ini saling terkait untuk mewujudkan tujuan SIMPEG untuk memudahkan karyawan dalam mengelola dan menggunakan data dalam memutuskan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bermacam-macam komponen

tersebut digunakan untuk menunjang implementasi dan pengembangan SIMPEG.

Berdasarkan hasil survei, disimpulkan bahwa hasil yang dihasilkan oleh SIMPEG di pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Data pegawai
- b) Rangkuman jumlah pegawai
- c) Peringkat
- d) Nama pegawai
- e) Nama pensiunan pegawai

Hasil yang dihasilkan oleh SIMPEG di pemerintah daerah berguna dalam kasus-kasus berikut:

- a) Untuk memudahkan proses pencatatan dan pengumpulan data dari pegawai
- b) Memudahkan dokumentasi dan akses ke database pegawai
- c) Memfasilitasi pengambilan dan pencetakan data untuk laporan
- d) Menurut keputusan orang pendukung.

Pemerintah daerah menerapkan SIMPEG dalam mendukung manajemen sumber daya manusia dalam mendukung survei yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), dalam penelitiannya, implementasi SIMPEG membantu pemerintah daerah untuk mengolah data kepegawaian untuk pemerintah kota Salatiga secara akurat, akurat dan komprehensif[12]. Studi serupa oleh Ferdous, Chowdury dan Buiyan (2015) menunjukkan penerapan sistem informasi talenta dapat mengontrol perilaku talenta dan mempercepat pengambilan keputusan karyawan.[13]

Anggaran pengembangan SIMPEG, sesuai dengan arahan redaksi jurnal, digunakan sebagai studi kepustakaan untuk penyusunan artikel ini, sehingga implementasi sistem informasi pegawai metode manajemen pemerintah daerah dalam Covid-19 memiliki SIMPEG. Membatasi. Yaitu,

1. Mendukung sistem manajemen PNS dan pengembangan sumber informasi kepegawaian yang tepat di instansi pemerintah.
2. Dapatkan data HR diperbarui dan menyatu.
3. Memberikan informasi yang akurat tentang pegawai pemerintah dengan tujuan pengembangan, kesejahteraan, perencanaan dan pengelolaan pegawai pemerintah serta dukungan pekerjaan yang baik di area pegawai pemerintah daerah.

Ternyata terdapat langkah yang baik menuju E-Government pembangunan SIMPEG di pemerintah daerah tidak lepas dari efisiensi di bidang manajemen sumber daya manusia. Integrasi teknologi informasi memudahkan dan memudahkan terciptanya database yang akurat dan up-to-date dalam peningkatan pelayanan dan pengolahan data di bidang SDM.[14]

Pemutakhiran data pegawai negeri secara berkala. Tambahkan fungsi atau izin dari menu akses. Dalam pendekatan sistem, sistem terkait dengan subsistem lain dari organisasi. Di sisi lain, dalam pemerintahan negara bagian, pemerintah adalah organisasi yang sangat banyak dan stafnya adalah salah satu subsistemnya. Organisasi besar sering

menyimpan catatan individu yang terkomputerisasi. SIMPEG adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang terintegrasi dan komprehensif.

Sistem informasi manajemen personel Departemen Dalam Negeri dan PEMDA, sistem informasi untuk mengelola personel yang ditugaskan ke personel dan perangkat lunak untuk pengumpulan, prosedur, dan penanganan; pusat data dan database untuk perangkat penyimpanan Dan perangkat komunikasi saling bergantung, bergantung, dan saling ditentukan dalam konteks penyampaian info personel.[15]

4. KESIMPULAN

Peneliti menarik kesimpulan yang ditulis pada artikel ilmiah Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian pada Covid-19 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem digitalisasi data arsip PNS kota adalah SIMPEG dengan sistem localhost atau offline. Hal ini karena kerusakan mudah diperbaiki dan dapat dilihat secara publik memakai sistem online. Dengan SIMPEG ini, pekerjaan akan lebih efisien dan efektif. Perkembangan tools SIMPEG diperlukan berdasarkan penggajian otoritas lokal dan analisis layanan yang sangat baik. Indikator keberhasilan SIMPEG pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat keakuratan dan validitas data lapangan menggunakan database SIMPEG.
2. Elemen mendukung implementasi SIMPEG agar dapat berfungsi dengan baik dengan memberikan pelatihan IT untuk SIMPEG yang ada. Adanya bantuan anggaran administrasi dari bupati setempat berarti program SIMPEG akan konsisten dimutakhirkan sesuai karakteristik yang dibutuhkan. Minimnya kesadaran ASN terkait pemutakhiran data menjadi kendala yang menghambat program SIMPEG.
3. Upaya peningkatan digitalisasi data kepegawaian di lingkungan lembaga kepegawaian pemerintah daerah telah diselenggarakan, antara lain pendokumentasian kekurangan fungsi program SIMPEG dan pembuatan aplikasi yang lebih kompleks sehingga memudahkan pegawai dalam menjalankan fungsi pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indrajit, "Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat," *E-Gov.*, p. 91, 2017. [Diakses 2 Juni 2021]
- [2] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 . 2000.
- [3] Jurachman, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di

- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo," *Inspirasi Manaj. Pendid.* 21, 2018, [Online]. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/viewFile/2424/22165>.
- [4] S. K. Safanawati and S. CMS, "Kegiatan Alih Media Koleksi Antiquariat Di Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Tekno Pertanian," *Nusant. - J. Inf. Libr. Stud.*, vol. 3, no. 1, p. 115, 2020, doi: 10.30999/njils.v3i1.807.
- [5] Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 29
- [6] L. Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *J. Il. Huk.*, vol. 10, 27, 19, 2014.
- [7] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014.
- [8] E. D. Kartiningrum, "Panduan Penyusunan Studi Literatur," *Lemb. Penelit. dan Pengabd. Masy. Politek. Kesehat. Japahit, Mojokerto*, pp. 1–9, 2015.
- [9] Afif Syarifudin Yahya, "Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau," *J. Manaj.*, vol. 11, no. 2, pp. 1–12, 2017.
- [10] Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- [11] K. Djawa and D. Puspasari, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Untuk Mendukung E-Government Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur," *J. Adm. Perkantoran*, vol. 3, pp. 1–15, 2015.
- [12] Athin Pratiwi, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bidang Sumber Daya Manusia (Sdm)," *J. Mhs. Adm. Negara (JMAN)*, Vol. 02 No. 02, Oktober 2018 ISSN 2222-3333 1, vol. 02, no. 02, p. 12, 2014.
- [13] F. Ferdous, M. M. Chowdhury, and F. Bhuiyan. Barriers to the Implementation of Human Resource Information Systems. *Asian Journal of Management Scences & Education*, 4 (1), 33-22, 2015.
- [14] Kuspriyomurdono, Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013.
- [15] Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Indonesia.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	4%
2	fadlinoch.blogspot.com Internet Source	1%
3	ejournal.stmikgici.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.untirta.ac.id Internet Source	1%
5	docobook.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
7	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%
9	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
12	dpad.jogjaprovo.go.id Internet Source	1 %
13	journal.uny.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to The Arthur Lok Jack School of Business Student Paper	1 %
15	ejournal.unkhair.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sinjai Student Paper	1 %
17	jurnal.sttmcileungsi.ac.id Internet Source	<1 %
18	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
19	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

21	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
22	docplayer.info Internet Source	<1 %
23	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
24	ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1 %
25	moam.info Internet Source	<1 %
26	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.stialan.ac.id Internet Source	<1 %
28	anzdoc.com Internet Source	<1 %
29	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
30	ppid.patikab.go.id Internet Source	<1 %
31	wiwitna.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	Delpiah Wahyuningsih, Ellya Helmud. "Penerapan Algoritma Genetika Untuk	<1 %

Optimasi Penjadwalan pada MTS Negeri 1 Pangkalpinang", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2020

Publication

33

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

34

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

35

pushep.or.id

Internet Source

<1 %

36

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off